



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(Perubahan RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245 /2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait adanya pergeseran anggaran baik berkurang maupun bertambah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323];
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
 20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Juli 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 245 /2025
TANGGAL 1 Juli 2025.

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

1.	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
2.	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
3.	Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah
4.	Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.	Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
7.	Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
12.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial
15.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja
16.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
18.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
19.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan
22.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
23.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
24.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
26.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

27.	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan
28.	Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29.	Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim
30.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung
31.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Murung pudak
32.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tanta
33.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus
34.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas
35.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kelua
36.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pugaan
37.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaro
38.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya
39.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Haruai
40.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Upau
41.	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Kata Pengantar



uji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 telah dapat diselesaikan, yang mana Dokumen Perubahan Renja ini merupakan suatu dokumen perencanaan jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Nasional sebagaimana dimaksud menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada gilirannya dijadikan acuan maupun pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seperti halnya pemerintah maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah yang salah satunya adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan daerah tahunan. Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, Sekretariat Daerah sebagai salah satu unsur perangkat daerah Kabupaten Tabalong memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA) *Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025*

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong setiap tahunnya. Oleh sebab itu Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempedomani Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong yang didalamnya memuat kebijakan, program maupun kegiatan serta pendanaan indikatif yang menitikberatkan pada skala prioritas dengan mempertimbangkan urutan pilihan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Kami menyadari bahwa dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja yang telah kami susun ini sudah barang tentu masih terdapat kekurangan dalam penulisannya, untuk itu kami mengharapkan masukan demi perbaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja ini.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong ini berguna sebagai bahan yang dapat memberikan kontribusi bagi proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Tabalong, 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong,



H. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670518 199803 2 004



Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	10
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	43
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	51
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025	54
A. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional	54
B. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja 2025	58
C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	60
BAB IV PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2025 - 2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025.

Perubahan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.



Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

B. Landasan Hukum

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);



3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah



- Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 04);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69); dan
 22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 04).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah :

- Untuk menentukan arah bagi proses penetapan kegiatan-kegiatan definitif yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada



Tahun 2025 sebagai manifestasi dari penjabaran tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.

- Untuk mendukung akselerasi pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

D. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Dalam BAB II ini akan dikemukakan mengenai evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sampai dengan Triwulan II tahun ini dan capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, analisa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong dan review terhadap rancangan awal Perubahan RKP



Kabupaten Tabalong Tahun 2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN
2025

Dalam BAB III ini akan dipaparkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB ini akan dipaparkan tentang pencatatan akhir yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut untuk seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong dalam mengoperasionalkan substansi Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan pencapaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Tahun 2025 tetap mengacu pada pencapaian indikator program yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 maupun dalam Perubahan RPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026.



Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp. 92.825.843.687,00 untuk melaksanakan 3 program yang dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 52 Sub Kegiatan.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026.

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025 terdiri 3 program, 18 kegiatan dan 55 sub kegiatan di Sembilan Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- e. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- f. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
9. Penataan Organisasi
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Fasilitas Keprotokolan
 - b. Fasilitas Komunikasi Pimpinan
 - c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- B. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 1. Administrasi Tata Pemerintahan



- a. Penataan Administrasi Pemerintahan
- b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - d. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
 - e. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- C. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi
 - b. Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - c. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian



2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - a. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - b. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - c. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Pada tanggal 21 Maret 2025 dilaksanakan rasionalisasi anggaran 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga anggaran tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong mengalami pengurangan sebanyak Rp. 4.173.272.842,- (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) menjadi Rp. 88.652.570.845,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) berkurang 4,49%



Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2025 realisasi pelaksanaan program dan kegiatan mencapai angka sebesar Rp. 29.667.453.293,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 88.652.570.845,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau realisasi mencapai 33,46%. Realisasi ini tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas Triwulan II sebesar Rp. 53.640.393.692,- dikarenakan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga banyak kegiatan yang perlu disesuaikan di Perubahan 2025 untuk mengakomodir Program Prioritas Kepala Daerah baru.

Perlaksanaan Program dan Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 tidak mendapatkan masalah ataupun kendala yang berarti dalam pelaksanaannya, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan yang ada. Hanya beberapa kegiatan ditunda sampai dilakukannya perubahan untuk dapat mendukung program prioritas Kepala Daerah yang baru.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi menuju Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Dari keseluruhan program yang telah direncanakan pada awal tahun pelaksanaan Renstra sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renstra telah dapat dilaksanakan secara tuntas.



Realisasi program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong untuk Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada *Tabel 2.1* (Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Triwulan II Tahun 2025).



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Tabel 2.1.
 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
 Triwulan II Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Setda Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN								
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai AKIP; Indeks Pelayanan Keseekretariatan Prosentase SAKIP SKPD yang Berpredikat BB; Persentase tingkat pelayanan protokol dan komunikasi kepala daerah / wakil kepala daerah	nilai; nilai; %; %	74; 88; 75; 50	72; 89; 35; 100	72; 89; 35; 100	100; 96,74; 627,90; 100	73; 88; 50; 100	100,00; 100,00; 100,00; 100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA)
Salinan dan Salinan Keluaran Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	dokumen	36	118	118	0	36	100,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	26	26	100	78	100,00
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	dokumen	2	30	30	100	90	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	18	12	12	100	36	100,00
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	8	50	50	100	150	100,00
4.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	1	0	0	0	0	0,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor Daerah	Jumlah Data Statistik Sektor Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	data	9	0	0	0	0	0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	1.024	1.060	1.060	100	1.024	100,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	105	105	105	100	342	100,00
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1.000	1.000	1.000	100	3.000	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Salinan dan Salinan Keluaran Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	laporan	24	24	24	100	48	100,00
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100,00
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1	1	100	3	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100,00
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	2	2	100	6	100,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	%	100	100	100	100	100	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	2	2	100	6	100,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	11	11	11	100	33	100,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	1	100	3	100,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	1	1	100	3	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Salinan dan Renc. Kegiatan & Anggaran Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	6	6	6	100	18	100,00
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	0	100	100		100	100,00
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	12	12		26	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	%	100	100	100	100	100	100,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	9	9	9	100	27	100,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2	2	2	100	6	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100,00
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	5	5	100	5	100,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	4	4	100	4	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten West Kalimantan Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	8	11	11	100	8	100,00
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan	14	14	14	100	14	100,00
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	2	2	2	100	2	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	2	2	2	100	2	100,00
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya ke rumah tangga an Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100	100,00
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	14	14	14	100	42	100,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	9	9	9	100	27	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	2	2	2	100	6	100,00
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik	%	100	100	100	100	100	100,00
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	dokumen	2	2	2	100	8	100,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	laporan	5	4	4	100	15	100,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	2	8	8	100	14	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA)
Salinan dan Salinan Salinan Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelayanan Ke Protokol an Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100,00
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	laporan	299	299	299	100	897	100,00
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	laporan	280	280	280	100	840	100,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	laporan	312	312	312	100	936	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA)
Salinan dan Laporan Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Disusun Tepat Waktu; Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan; Persentase Pembentukan Produk Hukum	%; %; %	100; 100; 100	100; 100; 100	100; 100; 100	100; 100; 100	100; 100; 100	100,00; 100,00; 100,00
4.01.02.1.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100,00
4.01.02.1.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen	17	14	14	100	42	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Salinan dan Salinan Keluaran Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.02.1.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	dokumen	5	5	5	100	15	100,00
4.01.02.1.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	dokumen	3	3	3	100	9	100,00
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	100	100	100	100	100	100,00
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	dokumen	2	2	2	100	8	100,00
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Implementasi Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	dokumen	20	20	20	100	60	100,00
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan	dokumen	136	136	136	100	408	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
		Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB							
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,	dokumen	24	24	24	100	72	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Salinan dan Salinan Keluaran Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Trantibum Linmas Terfasilitasinya dan Terkoordinasinya Produk dan Layanan Hukum	%	100	100	100	100	100	100,00
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	dokumen	280	280	280	100	950	100,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus	12	12	12	100	30	100,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	dokumen	690	690	690	100	1.780	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA)
Salinan dan Salinan Salinan Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Tingkat Sinkronisasi dan Penyelarasan Sektor Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan; Persentase Tingkat Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	%; %	100; 100	100; 100	100; 100	100; 100	100; 100	100,00; 100,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sinkronisasi dan Penyelarasan Kebijakan Perekonomian	%	100	100	100	100	100	100,00
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	dokumen	4	4	4	100	12	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Salinan dan Salinan Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
	dan BLUD	Pengelolaan BUMD dan BLUD							
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	laporan	2	2	2	100	6	100,00
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	dokumen	1	1	1	100	3	100,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100,00
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	dokumen	2	2	2	100	8	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	laporan	4	4	4	100	8	100,00
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	2	2	2	100	8	100,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terkoordinasi, Selaras dan Singkronisasinya Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	dokumen	2	2	2	100	12	100,00
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya	dokumen	2	2	2	100	8	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Salinan di Sambi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
		Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian							
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	dokumen	2	2	2	100	8	100,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang	%	100	100	100	100	100	100,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Salinan dan Laporan Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Satuan Target	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2025			Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	10	11=(10/5)*100
		dan Jasa							
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	150	150	150	100	600	100,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	41	3	3	100	12	100,00
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	150	150	150	100	400	100,00



Tabel 2.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola
Sekretariat Daerah Triwulan II Tahun 2025

JENIS PENERIMAAN	Target Tahun 2025	Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Triwulan II 2025		
		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				
- Gedung yang dikelola Sekretariat Daerah (Gedung Sarabakawa, Gedung Juang, Gedung Pusat Informasi, Gedung Islamic Center, Gedung Expo Center)	228.327.000	114.394.000	229.750.000	200,84%
- Rumah Dinas	154.912.500	77.606.000	36.850.000	47,48%
JUMLAH	383.239.500	192.000.000	266.600.000	124,16%

B. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.

Berdasarkan Undang - Undang tersebut, Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah / Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas



perangkat daerah serta pelayanan administratif, sementara tugas dari masing-masing Bagian Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

a) Bagian Tata Pemerintahan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama.

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

c) Bagian Hukum

Melaksanakan penyiapan perurnusan kebijakan daerah, pengoordinasian perurnusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pernantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukurn dan dokurnentasi dan informasi produk hukum.



d) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam dan administrasi pembangunan.

e) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

f) Bagian Umum

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah.

g) Bagian Organisasi

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan



analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

h) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan.

i) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan dan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, perekonomian dan administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif;



- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah lingkup tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, perekonomian dan administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan fungsi tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, perekonomian dan administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- e. Pengoordinasian pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- f. Pengoordinasian pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - a) Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Bagian Hukum;
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan;



- a) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- b) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

- 4) Asisten Administrasi Umum;
 - a) Bagian Umum;
 - i) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
 - b) Bagian Organisasi;
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - i) Sub Bagian Protokol
 - d) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - i) Sub Bagian Perencanaan
 - ii) Sub Bagian Keuangan
 - iii) Sub Bagian Pelaporan

- 5) Jabatan Fungsional;

Selanjutnya hasil Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong dapat disajikan pada **Tabel 2.3** sebagaimana berikut :

Selanjutnya tingkat pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, dapat dilihat sebagaimana di tabel berikut :



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka Nilai Target Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD 2025	Realisasi Capaian per Triwulan II 2025	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)					
1	Prosentase pembuatan laporan perencanaan dan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%	50%	
2	Persentase kedinasan yang terlayani dengan baik	100%	100%	50%	
3	Nilai Evaluasi AKIP Kab. Tabalong	71,45	71,45	0	
4	Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berskala Daerah dan Nasional yang dipublikasikan	100%	100%	50%	
5	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2,9200	2,9200	3,3161	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2023



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Saluran Resmi Kabupaten Tabalong Tahun 2021

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka Nilai Target Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD 2025	Realisasi Capaian per Triwulan II 2025	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6
6	Prosentase terlaksananya kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di kabupaten tabalong	100%	100%	50%	
7	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100%	100%	50%	
8	Persentase kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam lingkup perekonomian dan administrasi pembangunan	100%	100%	50%	
9	Persentase proses pengadaan barang /jasa sesuai usulan Perangkat Daerah yang dapat dilaksanakan sesuai jadwal	100%	100%	50%	
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OUTCOME					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	-	-	0%	Hasilnya keluar pada akhir tahun 2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka Nilai Target Standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra SKPD 2025	Realisasi Capaian per Triwulan II 2025	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	-	-	0%	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-	-	0%	
4	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah	-	-	0%	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah

Selama kurun waktu kedepan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.



Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagai unsur penunjang bagi Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi dalam perumusan kebijakan / regulasi, penyelesaian permasalahan lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah serta memperhatikan isu - isu dan permasalahan pembangunan yang diinventarisir dari seluruh sub struktur dibawah rentang kendali Sekretariat akan ditetapkan isu strategis Sekretariat Daerah.

Dengan penetapan isu strategis diharapkan kualitas pelayanan sebagai fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan dapat mendukung terwujudnya good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah secara keseluruhan. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Tabalong pada tahun 2021, Sekretariat Daerah sebagai unsur penunjang menetapkan isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagai berikut :

1. Perlunya konsistensi antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga masih ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya perencanaan yang jelas dan terukur.
2. Perlunya penyediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana untuk melayani keperluan kedinasan KDH/WKDH dan Aparatur Setda dengan baik.
3. Belum efektifnya penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.



4. Belum optimalnya fungsi protokoler dan komunikasi pimpinan dalam melayani KDH / WKDH.
5. Perlunya lebih ditingkatkan kualitas kinerja pemerintah daerahnya.
6. Perlunya lebih ditingkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
7. Perlunya penyelesaian regulasi dan kasus hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
8. Perlunya peningkatan perekonomian yang kokoh, pemantauan penggunaan Sumber Daya Alam serta penataan administrasi pembangunan yang berjalan beriringan.
9. Peningkatan pengendalian pembangunan, efektivitas dan transparansi pengadaan barang / jasa pemerintah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN SETDA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengingat salah satu tugas pokok Sekretariat Daerah yakni membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah yakni dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam pelaksanaan seluruh urusan bidang pemerintahan dan pembangunan yang mencakup tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, perekonomian dan administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan keuangan, umum, protokol dan komunikasi pimpinan serta organisasi.

Maka terkait dengan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Strategis Provinsi dalam hal ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong secara umum berperan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai program dan kegiatan Kementerian dan Pemerintah Provinsi yang berfokus dan berlokus di wilayah Kabupaten Tabalong disamping penanganan teknis yang dilakukan Perangkat Daerah terkait.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal



213 ayat (2), bahwa pada intinya Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d) Pembinaan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perangkat daerah tersebut merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah melantik Sekretaris Daerah berdasarkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas menjadi Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan kerja dengan Kementrian Dalam Negeri, Sekretariat Daerah dituntut memiliki komabilitas dalam menterjemahkan dan melaksanakan berbagai kebijakan nasional terutama pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberlakukan. Terhadap Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri tahun 2020 – 2024 sesuai dengan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024, baik Sekretariat Daerah maupun Kementerian Dalam Negeri saling mendukung terhadap upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di daerah, khususnya terhadap pencapaian tujuan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, yakni;

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1), dengan sasaran strategis ;
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1);
 - b) Meningkatkan implementasi nilai - nilai Pancasila di Daerah (SS2);
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3);
 - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2), dengan sasaran strategis ;
 - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5);
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6);
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7);
 - d) Terjaminnya hak - hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8);
 - e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9).



- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3), dengan sasaran strategis;
 - a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10);
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11);
 - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12).

Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong mendukung dua Tujuan pada RENSTRA 2020 – 2024 Kementrian Dalam Negeri yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2); dan
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3)

Tujuan nomor T2 yaitu Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi melalui Sasaran Strategis Nomor SS7 yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif serta Tujuan Nomor T3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui sasaran nomor SS10 yaitu Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terakomodir pada Misi Kabupaten Tabalong yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (M2) dan Mewujudkan



Kemandirian Daerah (M3) yang secara tidak langsung didukung oleh seluruh Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan.

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong seperti yang dikemukakan, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan sebagai berikut :



1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Setda yang akuntabel dan berorientasi hasil serta terfasilitasinya pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah. (T1)
2. Lebih optimalnya tata kelola urusan pemerintahan bidang administrasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum. (T2)
3. Lebih optimalnya pelaksanaan pembangunan melalui tata kelola administrasi perekonomian, sumber daya alam dan administrasi pembangunan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. (T3)

Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Sekretariat Daerah ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang akan direncanakan dan dihasilkan.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran.

Sasaran ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat



Daerah Kabupaten Tabalong serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Secara rinci sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan setda serta fungsi protokol dan komunikasi pimpinan daerah. (SS1)
2. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam koordinasi dan fasilitasi kegiatan tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum. (SS2)
3. Meningkatnya Efektifitas tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang Ekonomi SDA dan Administrasi Pembangunan serta Pengadaan barang dan jasa pemerintah. (SS3)

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Secara rinci perubahan Belanja dalam Program dan Kegiatan secara keseluruhan, total belanja pada Perubahan Renja 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong bertambah Rp. 27.785.713.176,- Atau 29,93% dari semula Rp. 92.825.843.687,- menjadi Rp. 120.582.804.628,-



Mencermati permasalahan daerah dan memperhatikan substansi RPD Kabupaten Tabalong tahun 2025-2026 serta mengantisipasi berbagai kecenderungan yang akan muncul tahun 2025, Usulan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ditampilkan pada *Tabel 3.1* berikut ini.



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA)
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025**

Tabel 3.1.
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG						
4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				87.154.836.667	120.582.504.628	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai AKIP; Indeks Pelayanan Kesekretariatan; Prosentase SAKIP SKPD yang Berpredikat SB; Persentase tingkat pelayanan protokol dan komunikasi kepala daerah / wakil kepala daerah	74; 88; 75%; 100%	74; 88; 75%; 100%	44.103.974.187	62.015.486.248	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	36 Dokumen	36 Dokumen	177.844.000	153.744.760	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	58.589.000	58.193.870	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.711.000	5.711.000	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	18 Laporan	31.978.000	37.378.000	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	31.566.000	31.214.125	



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA) Selamatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
4.01.01.2.01.08	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	11.051.820	
4.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	9 Data	9 Data	25.000.000	10.195.945	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.024 Dokumen	1.024 Dokumen	22.733.973.000	26.103.634.998	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang / bulan	105 Orang / bulan	22.583.875.000	27.975.182.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	130.169.000	108.523.998	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	24 Laporan	24 Laporan	19.929.000	19.929.000	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100%	100%	277.200.000	0	
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	277.200.000	0	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah	100%	100%	113.350.000	298.545.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berkata Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	113.350.000	298.545.000	



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA) *Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025*

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	100%	100%	4.087.769.400	10.064.406.163	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	187.210.000	171.725.260	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	614.915.000	6.593.693.503	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	92.554.400	80.929.400	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	193.060.000	218.060.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	3.000.000.000	3.000.000.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	100%	100%	6.641.960.000	7.653.900.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan	2.242.000.000	2.242.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	4.399.960.000	5.411.900.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.846.688.875	6.686.176.473	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	1.649.980.000	1.993.780.000	



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA) Selamatan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	160.700.000	294.010.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	2.036.008.875	4.398.386.473	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan serta Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan	14 bulan	14 bulan	777.725.000	777.725.000	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	177.725.000	177.725.000	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	600.000.000	600.000.000	
4.01.01.2.12	Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya ke rumah tangga an Sekretariat Daerah	100%	100%	3.339.115.725	6.267.497.920	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	1.758.566.725	2.659.577.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	792.191.000	1.312.691.000	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	788.358.000	2.295.229.920	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik	100%	100%	743.515.000	663.647.897	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	194.160.000	176.754.897	
4.01.01.2.13.02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	5 Laporan	169.909.000	191.335.000	



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA) *Salinan dan Pelaporan & Bidang Tahun 2025*

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	379.446.000	295.558.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelayanan Ke Protokol an Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100%	100%	1.364.833.187	1.346.206.037	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	299 Laporan	299 Laporan	512.448.000	577.581.850	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	280 Laporan	280 Laporan	377.070.000	297.243.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	312 Laporan	312 Laporan	475.315.187	471.351.187	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Disusun Tepat Waktu; Persentase Pelayanan Kelembagaan, Sosial Kemasyarakatan; Persentase Pembentukan Produk Hukum	100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%	38.474.641.500	53.913.979.113	
4.01.02.1.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100%	100%	3.116.148.500	2.875.120.675	
4.01.02.1.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	17 Dokumen	17 Dokumen	1.497.131.200	1.482.758.375	
4.01.02.1.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen	1.153.917.300	1.045.755.800	
4.01.02.1.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	465.100.000	346.606.500	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	100%	85.500.000	117.088.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	85.500.000	117.088.000	



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA) *Salinan dan Pelaporan 2025*

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Implementasi Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	100%	100%	34.671.603.000	50.331.292.988	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20 Dokumen	20 Dokumen	3.120.020.000	9.206.528.988	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	136 Dokumen	136 Dokumen	29.628.002.000	13.477.139.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	24 Dokumen	24 Dokumen	1.923.581.000	477.825.000	
4.01.02.2.02.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	100 Keluarga	0	3.262.500.000	



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA) *Salinan dan Laporan Tahun 2025*

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
4.01.02.2.02.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	256 Keluarga	0	23.907.000.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terfasilitasinya dan Terkoordinasinya Produk dan Layanan Hukum	100%	100%	601.390.000	590.477.450	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	280 Dokumen	280 Dokumen	101.568.000	101.568.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	12 Kasus	284.270.000	304.270.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	690 Dokumen	690 Dokumen	215.552.000	184.639.450	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Tingkat Sinkronisasi dan Penyelarasan Sektor Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan; Persentase Tingkat Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%; 100%	100%; 100%	4.565.921.000	4.653.339.267	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksanannya Sinkronisasi dan Penyelarasan Kebijakan Perekonomian	100%	100%	474.000.000	873.775.320	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	149.000.000	537.300.400	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000	104.851.000	



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA) *Salinan dan Salinan Salinan Tahun 2025*

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	231.623.920	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah	100%	100%	990.000.000	1.085.500.355	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	610.000.000	409.162.355	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	245.000.000	417.399.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	135.000.000	258.939.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terkoordinasi, Selaras dan Sinkronisasinya Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100%	410.000.000	313.185.470	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000	114.792.840	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000	86.158.190	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000	112.234.440	



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENCANA) *Salinan Draft Kabupaten Cirebon Tahun 2025*

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Pagu		Alasan Perubahan
			Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	Renja 2025	Renja 2025 Perubahan	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	2.681.921.000	2.380.878.122	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	150 Dokumen	330.705.000	296.194.000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	41 Dokumen	41 Dokumen	1.646.111.000	1.515.001.122	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 Orang	150 Orang	705.105.000	569.683.000	

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab sebelumnya bahwa dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan sebagaimana diketahui bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 telah disusun, maka dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2025 ini merupakan tahun pertama dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 yang didalamnya memuat kebijakan, program maupun kegiatan serta pendanaan indikatif yang menitik beratkan pada skala prioritas dengan mempertimbangkan urutan pilihan serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari prioritas pembangunan tahun sebelumnya dengan penekanan pada beberapa aspek tertentu sebagai berikut : peningkatan ekonomi kerakyatan, optimalisasi infratraktur dasar, optimalisasi sumber daya manusia, optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan.

Adapun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong pada Tahun 2025 direncanakan bertambah sebesar 27.785.713.176,- Atau 29,93% dari semula Rp. 92.825.843.687,- menjadi Rp. 120.582.804.628,- (*Seratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.



PERUBAHAN RENCANA KERJA (Perubahan RENUA) *Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025*

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan perencanaan untuk menentukan arah tindakan masa depan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

Tabalong, 2025
Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong,



H. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670518 199803 2 004